



PROSIDING

Seminar Nasional
& SARASEHAN

**PENDIDIKAN KARAKTER
BERBASIS PSIKOLOGI ISLAM**



Fakultas Psikologi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

04 September 2013

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN SARASEHAN
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PSIKOLOGI ISLAM
©2013 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Cetakan Ke-1

*Hak Penerbitan pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara
penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.*

Desain Cover	Fachrizal
Percetakan	Umsida Press
Lay-out	Ghozali Rusyid Affandi

Tim Editor:
Ghozali Rusyid Affandi, M.A.
Hazim, M.Si.
Eko Hardiansyah, M.Psi.

ISBN : 978-602-14336-0-7
Cetakan ke-1, Agustus 2013

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**
Jl. Mojopahit 666B
Sidoarjo – Jawa Timur 61215
Telp. (031) 8945444
Faks. (031) 8949333
psikoumsida@gmail.com
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Editor	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
SEMINAR “PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PSIKOLOGI ISLAM”	1
Peran Institusi Pendidikan dalam Membangun Karakter berbasis Psikologi Islam	2
<i>M. Noor Rochman Hadjam</i>	
Membangun Karakter Bangsa melalui Pendidikan dalam Keluarga Berbasis Nilai Agama.....	12
<i>Dr. Hamidah, M.Si., Psi.</i>	
DESIMINASI PENELITIAN	23
Karakter Positif Perspektif Al-Qur’an	24
<i>Ghozali Rusyid Affandi, Nuzulul Qoyyimah</i>	
Metode Pembiasaan As-Sunnah dalam Pendidikan Karakter	43
<i>Linda Yani Pusfiyaningsih</i>	
Hubungan antara Pola Pengasuhan Islami Orangtua dengan Kemampuan Sosialisasi Anak Usia Prasekolah.....	53
<i>Dhina Fransisca</i>	
Analisis Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Taman Kanak-Kanak Kota Malang	62
<i>Ni’matuzahroh</i>	
Pendidikan Karakter pada Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Pelabuhan Kamal Madura).....	76
<i>Hera Wahyuni</i>	
Pengembangan Organisasi Pada SMP “Y”	97
<i>Arini Widyowati</i>	
DESIMINASI GAGASAN	115
Pendidikan Karakter dalam Konsep Al-Ghazali.....	116
<i>Zainal Abidin & Nur Aziz Afandi</i>	
Pengintegrasian Nilai-Nilai Budipekerti Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Konsep Akhlaq Al-Qur’an dan Al-Hadist bagi Siswa Sekolah Dasar (SD)	137
<i>Syukron Mahmud Abdillah</i>	
Peran Pola Asuh Islami dalam Membentuk Karakter Anak	148
<i>Agustin Handayani</i>	

Orangtua dan Pembentukan Karakter Motivasi Berprestasi Anak dalam Perspektif Islam	162
<i>Susatyo Yuwono</i>	
Membentuk Karakter pada Anak dalam Keluarga yang Menggunakan Psikologi Islami.....	170
<i>Wahyu Budi Santoso</i>	
Peran Pola Komunikasi dalam Keluarga untuk Menanamkan Nilai-Nilai Islam pada Anak.....	189
<i>Dwi Wahyuningsih Ch</i>	
Dari Materialisme Hingga Memaafkan (Pentingnya Pendidikan Bersyukur dalam Pendidikan Karakter Anak Indonesia).....	205
<i>Retno Setyaningsih</i>	
Peran Keluarga dalam Mengembangkan Karakter Pemimpin.....	214
<i>Idha Rahayuningsih</i>	
Peran Ayah dalam Pengasuhan sebagai Faktor Protektif Resiliensi Anak.....	227
<i>Nurul Hidayati</i>	
Membangun Karakter Anak Jalanan Berbasis Partisipasi Masyarakat	232
<i>Hazim</i>	
Membangun dan Memupuk Pribadi yang Pro-Lingkungan dengan Membiasakan Anak Membuang Sampah pada Tempatnya.....	244
<i>Dani Kurniawan, Bening Nitanegara, Dino Rizardman Rahia</i>	
Pendidikan Seks Islami dan Penguatan Karakter Anak.....	253
<i>Effy Wardati Maryam</i>	

MEMBANGUN KARAKTER ANAK JALANAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Hazim

**Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

ABSTRACT

This paper aims to describe on how to build a character of street children through a participatory approach. The background of this idea is that there is a negative stigma against the street children due to their bad characters. Their existence as street children should be understood as not only a government's responsibility but also public responsibility. This means the people around the street children should participate to solve instead of discriminating them. There are some possible participations that can be contributed by the public such as psychological participation, physical Participation, physical and psychological participation, participation with skill, material participation, and money participation.

Key words: Character, Street Children, Public Participation

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk memaparkan tentang bagaimana membangun karakter anak jalanan berbasis partisipasi masyarakat. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh adanya stigma negatif terhadap anak jalanan dikarenakan oleh karakternya yang umumnya cenderung negative. Semestinya keberadaan mereka sebagai anak jalanan difahami sebagai masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ini artinya masyarakat di sekitar mereka juga harus berpartisipasi untuk memberikan solusi dan bukan justru memperlakukan anak jalanan secara diskriminatif. Ada banyak kemungkinan bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti partisipasi pikiran, Partisipasi tenaga, Partisipasi tenaga dan pikiran, Partisipasi keahlian, Partisipasi yang berupa barang, Partisipasi yang berupa uang.

Kata Kunci: Karakter, Anak Jalanan, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia telah menegaskan bahwa anak terlantar menjadi tanggung jawab Negara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 45) pasal 34 ayat 1 "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Anak jalanan adalah salah satu bentuk yang masuk kategori anak terlantar. Sekalipun konstitusi telah mengatur bahwa anak terlantar dipelihara Negara, tapi jumlah anak jalanan masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2011, terdapat sebanyak 135,983 jiwa anak jalanan.

Keberadaan anak jalanan selalu dipandang sebagai masalah, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Pandangan yang demikian terhadap anak jalanan karena tindakannya yang sering menimbulkan keresahan masyarakat. dengan kata lain, anak jalanan cenderung tidak memiliki karakter yang baik.

Paradigma publik terkait anak jalanan sebagai masalah yang harus disingkirkan ini berakibat pada perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka. Serta tidak banyak yang berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para anak jalanan. Padahal setiap anak tidak ada yang bercita-cita menjadi anak jalanan. Demikian halnya tidak ada keluarga yang berkeinginan untuk memiliki anak sebagai anak jalanan. Tapi faktanya, tidak semua anak bisa berkembang sesuai harapan banyak orang, khususnya orang tua. Banyak alasan yang mengharuskan seorang anak turun di jalanan.

Konsekuensinya, ketika sudah menjadi anak jalanan, seakan mereka sudah tidak boleh lagi memimpikan masa depannya. Padahal posisinya sesungguhnya sama dengan posisi anak pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan yang baik, tempat tinggal yang layak, pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup serta sejumlah kebutuhan dasar yang lain. Perlakuan yang demikian sama halnya dengan membunuh anak secara pelan-pelan.

Maka untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan, harus dilakukan dengan mengurai akar persoalannya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan perencanaan Kabupaten Sidoarjo 2012 menegaskan bahwa akar persoalan adanya anak jalanan adalah karena tingkat kualitas SDM yang rendah serta pendidikan karakter yang lemah (Bappeda Sidoarjo, 2012). Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memaparkan tentang membangun karakter anak jalanan berbasis partisipasi masyarakat sebagai langkah alternatif memberikan solusi pada anak yang kurang beruntung tersebut.

II. Anak Jalanan, Anak Tanpa Masa Depan

Anak Jalanan (Anjal); adalah mereka yang berusia antara 5-18 tahun dan menghabiskan sebagian besar kesempatannya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya (Depsos RI 2007). Secara nasional data anak jalanan berjumlah 135,983 jiwa. (Kemensos RI 2011). Sebuah angka yang besar yang patut menjadi perhatian bangsa Indonesia.

Unicef membedakan anak jalanan dalam tiga kategori, yaitu: a). *Children on the street*, adalah anak yang mempunyai kegiatan ekonomi (sebagai pekerja anak) di jalan dan masih

mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga, dan penghasilannya diberikan kepada orang tuanya. b). *Children of the street*, adalah anak yang berpartisipasi penuh baik secara ekonomi maupun sosial di jalan. Beberapa diantara mereka masih ada hubungan dengan orang tua, tetapi frekuensi pertemuan tidak menentu. Mereka adalah karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. c). *Families of the street*, adalah anak-anak dari keluarga yang hidup di jalan. (Mariati. 2002)

Faktor menjadi anak jalanan bisa bermacam-macam. Studi yang dilakukan oleh LPPM USM Semarang menyebutkan bahwa ada beberapa faktor adanya anak jalanan. Kemiskinan merupakan faktor tertinggi yang mencapai 83,33%. Sementara disebabkan oleh keretakan keluarga dan orang tua yang tidak faham dan tidak memberikan kecukupan akan kebutuhan sosial anak masing – masing berkontribusi sebesar 1,96% dan 0,98%. Selain itu, dorongan dari dirinya sendiri, sering mendapatkan kekerasan dari orang tua serta ingin mendapatkan kebebasan memberikan kontribusi sebanyak 13,7%. (LPPM US: 2002).

Dari hasil studi di atas diketahui bahwa Kemiskinan menjadi faktor utama anak terjun di jalanan. Ini artinya bahwa PR yang harus diselesaikan bukan saja “membersihkan” anak dari jalanan, tapi lebih dari itu adalah mengurai factor dari adanya perilaku tersebut.

2.1 Problem anak jalanan.

Anak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan sesungguhnya bukan tanpa masalah. Mereka mengalami sejumlah kerentanan yang sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak pada khususnya dan prinsip-prinsip kemanusiaan pada umumnya. Sejumlah kerentanan itu antara lain adalah:

a. Rentan mengalami putus sekolah

Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Meskipun Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, faktanya, tidak semua bisa menikmatinya. Hingga akhir tahun 2011, masih terdapat 230.000. anak Indonesia putus sekolah atau belum mengenyam pendidikan. Sebagian besar mereka didominasi anak jalanan dan gelandangan. (Anggraeni, 2012).

b. Rentan mengalami pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan seks bebas.

Terutama bagi anak jalanan perempuan, sebagian besar mereka pernah mengalami pelecehan seksual. Perkosaan adalah bentuk kekerasan lainnya yang sering dialaminya. Setara (1999) mencatat bahwa kasus perkosaan menjadi alasan

pertamaan anak jalanan perempuan mengalami hubungan seksual yang menyumbang sebanyak 30%. Selain itu, gadis di bawah umur yang menyandang sebagai anak jalanan ini juga rawan menjadi korban komersialisasi seksual seperti prostitusi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual maupun pornografi. YDA (1997) mencatat anak jalanan di Semarang yang dilacurkan mencapai 8%. Setahun berikutnya mengalami peningkatan signifikan ke 28% (PSW Undip; 1998) bahkan kemudian meningkat dua kali lipat (46,4%) di tahun berikutnya. (Depsos RI, 2010).

Komnas Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak jalanan meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2008 tercatat 626 korban kejahatan seksual, lalu meningkat di tahun 2009 hingga 705 korban, dan semakin meningkat di tahun 2010 yang mencapai 926.

Konsekuensi lanjutannya adalah mereka akan rentan terkena HIV/AIDS. Padahal jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Ironisnya, berdasarkan catatan WHO (Badan Organisasi Kesehatan Se-dunia) kasus HIV AIDS adalah ibarat gunung es. Artinya ketika diperoleh data 1 kasus, sesungguhnya terdapat 100-200 kasus yang belum terungkap. Tahun 2010, menurut prediksi para ahli, terdapat kurang lebih 80.000 – 120.000 penderita HIV/AIDS di Indonesia dan dimungkinkan 5–10 tahun mendatang terdapat sebanyak 100.000 orang yang meninggal akibat penyakit ini (Mahardika, 2010).

c. Kualitas Kesehatan yang buruk.

Pola hidup yang tidak teratur, mulai dari pola makan, kebersihan, terpaan polusi udara kian menjadikan mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan rentan terhadap gangguan kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, di antara penyakit yang rentan menjangkit adalah infeksi, seperti ISPA, diare, tifus, hepatitis dan kulit maupun rawan masalah gizi. (Depkes,2010).

d. Rentan menjadi target sasaran Narkoba.

Anak jalanan adalah Kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi target Narkoba. Baik sebagai pengguna maupun penjual. Hasil Penelitian SMA Tarakanita I cukup mengejutkan, 100% anak jalanan pernah ditawari Narkoba (Kompas, 24 Oktober 2008). Sementara Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan pada tahun

2004 sebanyak 92,8 persen anak jalanan terlibat dalam penjualan obat-obatan terlarang. (Kabar Indonesia 2009).

e. Rentan tindakan kekerasan

Kehidupan di jalanan identik dengan dunia kekerasan. Mereka bisa jadi menjadi pelaku tindakan kekerasan, atau mungkin korban kekerasan. Data yang dirilis oleh PBB (2006) menyebutkan bahwa homisida pada 2002 telah mengakibatkan kurang lebih 53.000 anak meninggal di seluruh dunia. Ironisnya, hampir 42% dari mereka adalah berusia 15-17 tahun. Sebanyak $\frac{3}{4}$ adalah menimpa pada anak laki-laki. Selain itu, ditemukan sebanyak 80-98% mengalami perlakuan kekerasan fisik. Sekitar 150 juta anak laki-laki berusia 18 tahun mengalami pemaksaan hubungan seksual atau bentuk kekerasan lainnya. Sementara Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI) mengungkapkan bahwa terjadi 417 kasus kekerasan terhadap anak selama Januari-April 2007. Hal ini mencakup kekerasan fisik (89 kasus), kekerasan seksual (118 kasus) dan kekerasan psikologis (210 kasus). Fakta yang ada di lapangan diperkirakan melebihi dari jumlah yang ada. Departemen sosial (2010) bahkan menilai kondisi kekerasan yang dialami oleh anak sudah mencapai memperhatikan sebab terjadi per dua menit. (Depsos, 2010).

Atas dasar sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh anak jalanan, publik sering menganggap bahwa anak jalanan sebagai anak yang nakal, sampah masyarakat, komunitas yang tidak punya masa depan. Sejumlah identitas yang melekat pada anak jalanan, mereka menjadi kelompok yang dianggap layak untuk dihinakan, disepelekan, dilecehkan, lebih tragisnya, sebagian pihak kemudian memanfaatkan untuk dieksploitasi.

Opini publik yang demikian akan berbahaya bagi kelangsungan masa depan anak dan juga masa depan bangsa Indonesia. Anak jalanan memang memiliki sejumlah keterbatasan, tapi bukan berarti bahwa mereka yang sedang tidak beruntung ini dianggap layak untuk diperlakukan secara diskriminatif. Oleh karena itu, mestinya menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat dalam merehabilitasi agar anak jalanan bisa tumbuh secara wajar sebagaimana anak pada umumnya dan bisa membangun masa depannya dengan lebih cerah.

III. Partisipasi Publik Membangun Karakter Anak Jalanan

3.1 Membangun karakter anak.

Istilah karakter berasal dari Bahasa Yunani yaitu *charassein* yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola (Megawangi, 2004). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat- sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti (Fajri & Ratu). Dalam istilah Arab, karakter sepadan dengan kata “akhlak”, yang berarti perangai, kelakuan, tabi’at, watak dasar, kebiasaan, peradaban yang baik dan agama (Ma’luf, 1994). Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Pusat Kurikulum dalam buku panduan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mendefinisikan karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain, menghargai antar sesama (kemendiknas, 2010). Berdasarkan beberapa pengertian karakter tersebut, maka karakter adalah ciri khas kekuatan mental, moral atau kepribadian yang dimiliki oleh individu yang sehingga dengannya dapat terlihat adanya perbedaan pada setiap individu.

Anak jalanan cenderung memiliki karakter yang kurang baik dan memiliki stigma negatif dalam pandangan masyarakat. Untuk rehabilitasi karakter anak jalanan, diperlukan internalisasi melalui proses pendidikan (dalam pengertian luas) yang cukup panjang. Oleh sebab itu, menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter harus menekankan tiga aspek yang penting untuk dikembangkan. Yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Indikator dari masing-masing aspek adalah:

“1). *Moral knowing*; kesadaran moral (*moral awareness*, mengetahui nilai- nilai moral (*knowing moral values*), mengambil sudut pandang orang lain (*perspective-taking*), pemahaman makna moral (*moral reasoning*), pengambilan keputusan berbasis moral (*desicion moral*), mengenali diri sendiri (*self knowledge*). 2). Indikator *moral feeling* meliputi; hati nurani (*conscience*), menghargai diri sendiri dan orang lain (*self- esteem*), memahami kondisi emosional orang lain (*empathy*), mencintai kebaikan (*loving the good*), mengendalikan diri sendiri (*self-control*), terbuka pada kebenaran dan menjaga perasaan (*humility*). 3). *Moral action*, antara lain: kemampuan berfikir, berperasaan, dan bertindak moral (*competence*), memiliki keinginan dan energi moral (*will*), dan berkebiasaan (*habit*).” (Megawangi. 2004).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, upaya membangun karakter anak tidak bisa dilepaskan dengan tanggung jawab untuk melakukan tiga pendekatan: “olah pikir (pengetahuan), olah rasa (apresiasi), dan olah raga (keterampilan) dalam konteks kehidupan psikologis, sosial dan kultural” (Megawangi. 2004).. Karena berangkat dari

pendekatan inilah, nilai-nilai (*value*), lingkungan, dan spiritual akan menjadi bahan untuk membentuk karakter anak jalanan. (Megawangi. 2004).

Yahya (2010) menjelaskan bahwa basis yang digunakan dalam kerangka membangun karakter bisa bersumber dari:

“Pertama, nilai religius yang merupakan wahyu Tuhan (konservasi moral). Kedua, berbasis nilai budaya, antara lain berupa budi pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). Ketiga, berbasis lingkungan. Keempat, berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis). Pendidikan karakter berbasis potensi diri adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik agar mampu mengatasi diri serta mampu mengembangkan segala potensi diri yang dimilikinya.” (Yahya. 2010).

Proses rehabilitasi karakter melalui sejumlah sumber di atas tidak cukup hanya diperoleh di sekolah. Pendidikan karakter harus dilaksanakan secara terintegrasi, di sekolah, keluarga dan juga lingkungan (Koesoma. 2010).

Dalam konteks anak jalanan, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan karakter mereka. Inilah yang dimaksud dengan Partisipasi masyarakat membangun karakter anak Jalanan.

3.2 Tahapan membangun karakter.

Membangun karakter harus disesuaikan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan hadits yang artinya:

“Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab (budi pekerti) yang baik”. (H.R. Ibnu Majjah).

“Surulah anak-anakmu menjalankan shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan shalat. Dan pisahkanlah tempat tidurnya (HR. Al-Hakim dan Abu Daud, diriwayatkan dari Ibnu Amr bin al-Ash RA.).”

“Anas berkata bahwa Rasulullah bersabda: Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkannya aqiqahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia dididik beradab susila, jika ia telah berumur 13 tahun dipukul agar mau shalat (diharuskan). Jika ia telah berumur 16 tahun boleh dikawinkan, setelah itu orang tua berjabat tangan dengannya dan mengatakan: saya telah mendidik, mengajar dan mengawinkan kamu, saya mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnahan di dunia dan siksaan di akhirat”. (HR. Ibnu Hibban). (Hidayatullah, 2010)

Furqan membagi pendidikan karakter menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahapan adab, tahapan tanggung jawab, tahapan *caring*, tahapan kemandirian, dan tahapan bermasyarakat. (Hidayatullah, 2010)

a. Tahapan Adab (Usia 5- 6 tahun)

Pada usia 5- 6 tahun, anak dididik untuk mengenal nilai- nilai benar dan salah, atau karakter baik dan buruk. Anak diajarkan untuk mulai memahami mana yang seharusnya dilakukan maupun yang ditinggalkan. Anak dikenalkan dengan Tuhannya melalui agama yang dianut, diajak menirukan gerakan ibadah, dan membiasakan berperilaku sopan (Permendiknas, 2009). Pada usia ini, anak telah memasuki pendidikan formal pada jenjang pendidikan pra sekolah atau Taman Kanak- Kanak.

b. Tahapan tanggung jawab (Usia 7- 8 tahun).

Pada usia 7 tahun, anak sudah dianjurkan untuk mulai melaksanakan ibadah yang diperintahkan. Hal ini menandakan bahwa pada usia 7 tahun, anak harus dibiasakan mulai memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti mandi, makan, berpakaian dilakukan dengan sendirinya. Usia 7 tahun, anak telah memasuki jenjang pendidikan dasar.

c. Tahapan *Caring* – peduli (9- 10 tahun)

Jika pada usia 7 tahun anak sudah mengenal tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap dirinya sendiri, maka pada usia 9 - 10 tahun, anak harus mulai diajarkan untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Menghormati hak- hak dan kewajiban orang lain, dan tolong- menolong sesama. Adanya rasa kepedulian terhadap orang lain, akan menumbuhkan jiwa- jiwa kepemimpinan pada anak.

d. Tahapan kemandirian (Usia 11- 12 tahun)

Pendidikan karakter yang telah didapat anak pada usia sebelumnya akan menjadikan anak lebih dewasa, memantapkan karakter anak sehingga menimbulkan sikap kemandirian pada anak. Kemandirian ini akan ditandai adanya sikap mau menerima segala resiko dari perbuatan yang dilakukan, mulai mampu membedakan mana yang baik dan yang benar.

e. Tahapan bermasyarakat (Usia 13 tahun keatas).

Pada tahapan ini, anak dipandang telah mampu hidup bergaul dalam masyarakat luas. Anak mulai diajarkan untuk memiliki sikap integritas dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis lapisan masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan dalam tahapan sebelumnya diharapkan mampu mewarnai kehidupan bermasyarakatnya, dan karakter-karakter yang telah ditanamkan pada tahapan sebelumnya juga diharapkan mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahapan-tahapan di atas dipaparkan untuk diketahui agar proses membangun karakter bisa berdampak secara efektif sesuai dengan perkembangan anak secara berkelanjutan. Hanya saja, kondisi anak jalanan tidak bisa disamakan dengan kondisi anak pada umumnya. Ada sejumlah variabel lain yang ikut mempengaruhi kondisi kejiwaan anak yang mesti diperhatikan. Misalnya mengenai problem ekonomi keluarga, problem ketidak-harmonisan keluarga dan lain-lain.

3.3 Partisipasi masyarakat membangun karakter anak jalanan

Partisipasi Menurut Keit Davis adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Sastroputro. 1989:35). Sedangkan menurut Verhagen, "partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat." (Mardikanto 2003). George Terry menjelaskan, partisipasi merupakan bentuk keterlibatan seseorang baik mental maupun emosional dalam memberikan kontribusi mengenai proses pembuatan keputusan (Sakdiyah, 2006:34).

Partisipasi yang dimaksud dalam konteks rehabilitasi karakter anak jalanan adalah Keterlibatan elemen masyarakat sebagai representasi dari sikap nyata dalam kegiatan secara totalitas baik mental maupun emosional sehingga mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan bertanggung jawab terhadap perbaikan karakter anak jalanan. Partisipasi dalam hal ini memiliki peran signifikan karena proses internalisasi nilai hingga terbentuknya menjadi memerlukan proses integrasi masing-masing pihak, baik sekolah, keluarga, maupun institusi lain yang ada di lingkungan sekitar.

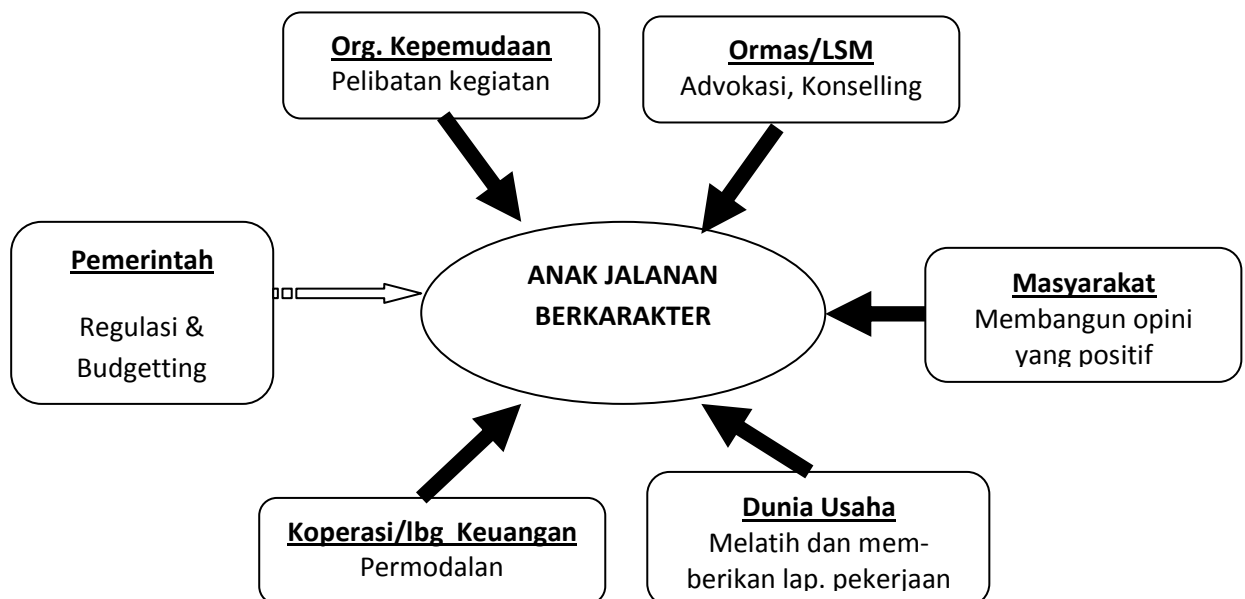
Wujud partisipasi yang dirumuskan oleh Keits Davis mungkin bisa dilakukan dalam rangka rehabilitasi karakter masyarakat (Sakdiyah, 2006:36):

- a. Partisipasi berupa pikiran (*psychological participation*) merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mencurahkan pikiran pada suatu rangkaian aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu. Sumbangsih pemikiran bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat yang berorientasi pada rehabilitasi karakter anak jalanan. Baik dari kalangan akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat, LSM maupun lainnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah menyebarkan opini publik bahwa anak jalanan harus dicarikan solusi, bukan dihindari. Selain itu, bisa juga memberikan saran atau nasehat kepada anak jalanan atau keluarganya agar bisa memilih kehidupan yang lebih baik.
- b. Partisipasi berupa tenaga (*physical Participation*) adalah partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Wujudnya bisa memberikan bantuan teknis kepada anak jalanan agar bisa keluar dari keterpurukannya sesuai dengan kondisi yang dialami.
- c. Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (*physical and psychological participation*). Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan aktifitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan. Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan secara berkelanjutan pada anak jalanan. Langkah ini bisa memberikan penyadaran sekaligus solusi yang terbaik bagi mereka.
- d. Partisipasi berupa keahlian (*participation with skill*) merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya. Setiap anak pasti memiliki bakat sendiri-sendiri, tak terkecuali anak jalanan. Elemen masyarakat yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kebutuhan anak jalanan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan merehabilitasi mereka.
- e. Partisipasi yang berupa barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Partisipasinya bisa berupa pemberian pakaian, alat usaha, tempat tinggal, atau lainnya yang dibutuhkan.
- f. Partisipasi yang berupa uang (*money participation*). Bentuk partisipasi ini adalah dengan memberikan sumbangan uang untuk kegiatan. Kemungkinan keterlibatan ini terjadi karena orang atau kelompok tidak bisa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Partisipasi yang berupa uang dan barang sifatnya tersamar sebab dalam hal pihak

penyumbang tidak terlihat secara jelas beraktifitas melainkan mengikutsertakan barang atau uangnya. Masyarakat yang memiliki kelebihan finansial juga bisa berperan mensupport dalam bentuk pemberian bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa faktor utama mereka menjadi anak jalanan adalah karena tuntutan ekonomi.

Sejumlah partisipasi ini bisa dilakukan secara parsial maupun terintegrasi. Tetapi akan lebih efektif bila bisa terorganisir dengan rapi sehingga masing-masing bisa berpartisipasi secara baik sesuai dengan peran yang mungkin dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk mengorganisir potensi-potensi di masyarakat agar bisa bekerjasama secara efektif. Termasuk di dalamnya adalah membuat regulasi serta penganggaran guna mendukung penyelesaian anak jalanan.

Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan secara singkat dapat dilihat dalam digram berikut:



Jika sejumlah partisipasi di atas bisa dilakukan, maka secara tidak langsung anak jalanan akan merasa mendapat perhatian, sehingga perilaku yang dianggap menyimpang bisa diminimalisir. Untuk itu, Partisipasi di atas penting dilakukan dalam rangka membangun kesadaran semua elemen masyarakat bahwa anak jalan bukan komunitas yang layak didiskriminasikan tapi merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan

penyelesaian secara bersama. Lebih dari itu, agar anak jalanan bisa mandiri dan tumbuh berkembang sebagaimana anak pada umumnya.

IV. KESIMPULAN

Setiap anak memiliki hak membangun mimpi masa depan yang lebih baik. Tak terkecuali anak jalanan. Tidak semestinya anak bangsa dibiarkan terjerumus dalam kerasnya kehidupan jalanan yang menjadikan mereka tidak sempat lagi memimpikan masa depannya. Karena hal ini jelas melanggar konstitusi Republik Indonesia dan juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sayangnya, masyarakat cenderung berstigma negatif terhadap anak jalanan. Berbagai kondisi yang dialami anak jalanan yang umumnya kurang baik menjadi alasan mendiskriminasinya tanpa berupaya memberikan tawaran solusi buat mereka. Padahal semestinya, mereka bukan masalah yang harus dihindari, tapi masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Langkah awal yang perlu dilakukan sebagai upaya solusi terhadap mereka adalah perbaikan karakternya. Untuk itu, Pemerintah memiliki tanggung jawab secara konstitusi untuk memberikan solusi bagi mereka. Tetapi akan lebih efektif jika semua elemen masyarakat bisa bermitra untuk memberikan solusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing secara partisipatif. Wujud partisipasinya bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing individu. Baik yang bersifat materiil maupun non materiil.

KEPUSTAKAAN

- Anggraeni, Retno Wulan. 2012. *Masih pentingkah pendidikan untuk anak terlantar*, [<http://blog.elearning.unesa.ac.id/retno-wulan-anggraini/masih-pentingkah-pendidikan-untuk-anak-terlantar/>] diakses 20 Juni 2012.
- Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2012. *Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2012-2015*. Sidoarjo.
- Departemen Kesehatan. 2010. *Anak jalanan juga harus sehat*, [http://www.kesehatananak.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54:anak-jalanan-juga-harus-sehat&catid=40:subdit-5&Itemid=83/] diakses 20 Juni 2012.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2007. *Panduan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) & potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)*, Jakarta.

-2010. *Kekerasan terhadap anak jalanan*, [<http://sdc.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20>], diakses 20 September 2012
- Harian Kompas, 24 Oktober 2008.
- Hidayatullah, M. Furqon. *Guru Sejati Membangun Insan berkarakter Kuat dan Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2012. *Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) potensi dan kesejahteraan sosial (PSKS) tahun 2011*. [<http://database.kemosos.go.id/modules.php?name=Pmks2011>], diakses 30 Juli 2013.
- Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010., *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Jakarta.
- Koesoma A, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- LPPM Universitas Semarang, *Study karakteristik anak jalanan dalam upaya penyusunan program penanggulangannya. Kajian empiric di Kota Semarang*. Jurnal Riptek vol 2, no 2 tahun 2008. Hal. 1-6
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: al-Matba'ah al-Katsulikiyyah, 1994.
- Mahardika, trisna. 2010. *hubungan pengetahuan wanita tuna susila*, [<http://trisna-mahardika.blogspot.com/2010/06/hubungan-pengetahuan-wanita-tuna-susila.html>]. diakses 23 Juni 2012.
- Mariati, Caecilia Atik, *Fenomena Perilaku Minta-minta (Mengemis) pada Anak-anak Jalanan di Semarang*, (tidak dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2002), hlm. 18
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter: Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Riptek, Vol. 2, no 2 tahun 2008, hal 1-6
- Sakdiyah, Efa M. 2006, *Pengaruh Motivasi, Disiplin, dan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Tayu Pati Semester II Tahun Ajaran 2005/2006*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. (<http://www.scribd.com/doc/25009775/13/Pengertian-Partisipasi>), diakses tanggal 22 Oktober 2012.
- Sastropoetro, Santoso, R.A. 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Undang-undang Dasar 1945
- Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta; Pelangi Publishing, 2010.
- Zul, Em. Fajri, Aprillia, Ratu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.